



Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021

The Influence of Economic Growth and Government Expenditure on Regional Original Income in the Regional Government of Southeast Aceh Regency in 2017-2021

Rina Malahayati, Deni Trianda Pitri, Julianti

Universitas Gunung Leuser Kutacane Aceh, Indonesia

*Email: diarieriena@gmail.com

*Correspondence: Rina Malahayati

DOI:

10.36418/comserva.v2i5.601

Histori Artikel

Diajukan : 25-08-2022

Diterima : 18-09-2022

Diterbitkan : 30-09-2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Dari Tahun 2017-2021. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dari Tahun 2017 sampai dengan 2021. Penelitian ini menggunakan metode sensus. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis path. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Pendapatan asli daerah dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negative terhadap Pendapatan asli daerah

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Pertumbuhan Ekonomi; Pengeluaran Pemerintah

ABSTRACT

This study aims to find out how big the influence of economic growth and government expenditure is on regional own-source income in the Regional Government of Southeast Aceh District from 2017-2021. This research includes associative research. The population of this study is the Regional Government of Southeast Aceh Regency from 2017 to 2021. This research uses the census method. Data analysis techniques using path analysis. The results of the study show that economic growth has a positive effect on regional original income and government spending has a negative effect on regional original income.

Keywords: *Locally-Generated Revenue; Economic Growth; Government Spending*

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten / kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut di kenal dengan otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, meningkatkan kuantitas pelayan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing serta mengurangi ketidak meratanya pembangunan

yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antar pemerintah pusat dan daerah (Aryani & Hari, 2019).

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi sumber penerimaan daerah untuk menentukan keberhasilan dalam melaksanakan tugas sebagai pemerintahan, baik dalam sektor perdagangan melalui jalur darat atau jalur laut, yang dengan hal itu masyarakat menjadi lebih terbuka secara sosio ekonomi (Swastiwi & Simbolon, 2021).. Semakin besar penerimaan PAD maka semakin kecil tingkat tergantung kepada pemerintah pusat, dan menunjukkan pemerintah daerah semakin mandiri dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) (Zahari, 2017).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan keuangan asli suatu daerah yang merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata. Suatu daerah dikatakan siap untuk melaksanakan otonomi daerah apabila PAD dapat memberikan sumbangan yang cukup untuk penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah (Jannah et al., 2016). Adapun yang menjadi sumber-sumber PAD Kabupaten Aceh Tenggara meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Sejalan dengan hal tersebut kabupaten/kota kawasan perbatasan dengan Tanah Karo, Sumatera Utara Provinsi Aceh yang terdiri dari Kabupaten Aceh Tenggara, untuk mengetahui keberhasilan pembangunan perekonomian dan kinerjanya pemerintah tersebut, dapat diamati melalui beberapa indikator yang mempengaruhi PAD. Indikator tersebut dapat dianalisis melalui Pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang menyebabkan kenaikan PAD adalah pertumbuhan ekonomi yang positif.

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dilihat dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) (Oktafia et al., 2018). Perbandingan nilai PDRB ADHK tahun berjalan dengan tahun sebelumnya merupakan angka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan tersebut. PDRB dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Barang-barang dan jasa-jasa ini diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut, tetapi oleh penduduk negara lain yang bertempat tinggal di negara tersebut. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan Pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah.

Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu indikator dalam PAD. Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan yang dilakukan untuk membiayai berbagai pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pengeluaran pemerintah tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi agar menjadi lebih baik dan efisien. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa maka pengeluaran pemerintah akan mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah tentu saja tidak hanya melakukan pengeluaran, tetapi juga penerimaan. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dimasukkan dalam suatu konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara.

Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan – kegiatan nya. Pengeluaran pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintah sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian menurut Mangkuwinata (2014) dan Novriansyah (2018). Pengeluaran pemerintah diperuntukkan dalam membeli barang dan jasa, dari kegiatan tersebut

pemerintah tidak hanya melakukan pengeluaran semata-mata, melainkan adanya kegiatan dalam hal penerimaan berupa pajak dan retribusi sebagai upaya keikutsertaan masyarakat dalam hal membangun sarana publik yang seluruh masyarakat dapat menikmati dan mempergunakannya sehingga memperlancar kegiatan ekonomi yang tidak terlepas dari campur tangan pemerintah sehingga sumber penerimaan pemerintah akan bertambah. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang merupakan tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah akan menghasilkan produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian. Proses pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat juga akan meningkatkan pendapatan yang pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi, dan pada akhirnya akan menaikkan PAD melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan pendapatan daerah lainnya.

Berikut ini merupakan data perkembangan PAD, Pertumbuhan Ekonomi dilihat dari PDRB dan pengeluaran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Periode 2017-2021

Tabel 1. PAD, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 – 2021

Tahun	PAD	PDRB (Jutaan)	Pengeluaran Pemerintah
2017	60,05 M	3,197,952.08	1.343,79 M
2018	80,26 M	3,302,242.16	1.183,21 M
2019	117,63 M	3,442,064.32	1.364,54 M
2020	98,35 M	3,436,343.94	1.336,17 M
2021	82,15 M	3,487,156.75	908,88 M

Sumber: <https://djk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

Berdasarkan data pada tabel 1. PAD, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah kabupaten Aceh Tenggara, terlihat bahwa dari tahun (2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021) terjadi fluktuatif pengeluaran pemerintah, PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara justru mengalami hal serupa. Tetapi di tahun 2017 menuju 2018 PAD mengalami Kenaikan sedangkan Pengeluaran Pemerintah mengalami penurunan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan teori Harrod-Domar dalam Sadono Sukirno yang mengatakan bahwa pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian.

Penelitian yang membahas mengenai Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah (Kurniawan et al., 2017), (Prakarsa, 2014), (Hidayat & Nalle, 2017), (Adyatma & Oktaviani, 2015) dan Zahari (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah dari segi tahun pengamatan berbeda, tempat penelitian, dan metode penelitian. Penelitian ini mengamati tahun 2017 s.d 2021, tempat penelitian pada Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara, dan Metode Penelitian adalah sensus.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021”.

METODE

Sifat penelitian ini menggunakan sifat penelitian kuantitatif, yaitu sifat penelitian yang di lakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel X yang yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X1) dan Pengeluaran Pemerintah (X2) Terhadap Variabel Y Adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Populasi dalam penelitian saya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dari Tahun 2017 sampai dengan 2021. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, Data sekunder berupa Pertumbuhan Ekonomi dilihat dari PDRB diperoleh data di BPS Kutacane, Pengeluaran Pemerintah dan pendapatan asli daerah berasal dari laporan keuangan yang di publikasi pada periode turun waktu 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 diambil dari laporan keuangan <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2017&provinsi=01&pemda=06>.

Teknik Analisis Data

(Rosita & Yuniati, 2016) Analisis data dalam penelitian ini adalah Analisis Path, koefisien Determinasi Uji (R²), dan uji t.

Analisis Path

Analisis jalur (path analysis) atau analisis regresi yang distandarkan (standardized multiple regression), yaitu analisis regresi yang menggunakan hubungan diantara variabel-variabel yang distandarkan (standardized variables) (Rina, 2021). Berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya, maka strukturnya yaitu PAD, Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Setelah dilakukan transformasi data maka persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \beta_{12}X_1 + \beta_{22}X_2 + E$$

Dimana Y adalah Pendapatan asli daerah, β_{xi} ($i = 1,2$) adalah koefisien regresi yang distandarkan (koefisien jalur), X1 adalah pertumbuhan ekonomi, X2 adalah pengeluaran pemerintah dan E adalah error term.

Keterangan:

Y	= Pendapatan Asli Daerah
β_{12}	= Koefisien regresi
X ₁	= Pertumbuhan Ekonomi
X ₂	= Pengeluaran Pemerintah
e	= Error term

Berdasarkan rumus tersebut untuk mengetahui besarnya pengaruh ditunjukkan dengan mengkuadratkan nilai koefisien jalur (β_{xi}), kriteria yang digunakan adalah dengan cara mengkuadratkan kriteria yang dikemukakan oleh (Pasaribu & Ruserlistyani, 2012).

Rancangan Pengujian Hipotesis

Menurut (Purba, 2018), Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (Uji T).

Menurut (Dewi et al., 2014), Uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel bebas terhadap variabel terkait secara parsial. Berhubung penelitian ini menggunakan metode sensus, maka untuk pengujian hipotesis tidak dilakukan uji signifikansi, baik uji F (untuk pengaruh secara bersama-sama) maupun uji t (untuk pengaruh secara parsial). Kesimpulan diambil langsung dari nilai koefisien jalur masing-masing variabel independen serta koefisien determinasi, baik secara bersama-sama maupun secara parsial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara pada awal terbentuk tahun 1974 terdiri dari 9 kecamatan dan saat ini berkembang menjadi 16 kecamatan yaitu Kecamatan Lawe Alas, Babul Rahmah, Tanoh Alas, Lawe Sigala-Gala, Babul Makmur, Semadam, Leuser, Babel, Bukit Tusam, Lawe Sumur, Babussalam, Lawe Bulan, Badar, Darul Hasanah, Ketambe, dan Deleng Pokhkisen.

Jumlah desa di kabupaten Aceh Tenggara seluruhnya sebanyak 385 desa, yang terdiri dari 28 desa di Kecamatan Lawe Alas, 27 desa di Kecamatan Babul Rahmah, 14 Desa di Kecamatan Tanoh Alas, 35 Desa di Kecamatan Lawe Sigala gala, 21 Desa di Kecamatan Babul Makmur, 19 Desa di Kecamatan Semadam, 23 Desa di Kecamatan Leuser, 33 Desa di Kecamatan Babel, 23 Desa di Kecamatan Bukit Tusam, 18 Desa di Kecamatan Lawe Sumur, 27 Desa di Kecamatan Babussalam, 24 Desa di Kecamatan Lawe Bulan, 18 Desa di Kecamatan Badar, 28 Desa di Kecamatan Darul Hasanah, 25 Desa di Kecamatan Ketambe, dan 22 Desa di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Jumlah penduduk Aceh Tenggara tahun 2021 berdasarkan hasil SP2020 (September) dan hasil proyeksi interim 2020-2023 (pertengahan tahun/juni) adalah sebanyak 224.119 jiwa dengan rincian 112.455 jiwa penduduk LakiLaki dan 111.664 jiwa penduduk perempuan.

Hasil Penelitian Analisis Path

Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi (X1), dan pengeluaran pemerintah (X2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda yang distandardkan atau analisis jalur.

Persamaan jalur yaitu:

$$Y = 1,222X1 - 1,368X2 + e$$

Tabel 2 Analisis Path
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	t Sig.
1 (Constant)	105.000	31.629		3.320 .080
Pertumbuhan Ekonomi	.835	.363	1.222	2.299 .148
Pengeluaran Pemerintah	-6.534	2.540	-1.368	-2.572 .124

a. Dependent Variable: PAD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa $PYX_i \neq 0$, dimana $PYX_1 = 1,222$, $PYX_2 = -1,368$. Seperti diketahui bahwa syarat untuk menyatakan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen apabila paling sedikit $PYX_i \neq 0$. Besarnya (kuat-lemahnya) pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasinya dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh 1,00 atau 100%. Berdasarkan Priyatno (2017), nilai koefisien determinan 100% dikategorikan pengaruh yang sangat besar.

Hasil koefisien jalur diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan asli daerah (Y). Artinya jika Pertumbuhan ekonomi di sebuah Kab/provinsi naik maka akan mengakibatkan kenaikan pada tingkat pendapatan asli daerah kabupaten Aceh Tenggara. Dari persamaan regresi berganda, diketahui bahwa PAD mempunyai koefisien positif sebesar 1,222 dikuadratkan sebesar 1,4932 atau 149,32%. Pertumbuhan ekonomi memberikan

pengaruh terhadap PAD sebesar 149,32%. Semakin tinggi Pertumbuhan ekonomi yang diperoleh maka tingkat PAD akan meningkat.

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak daerah dan retribusi daerah berkaitan erat dengan tingkat penghasilan masyarakat. Peningkatan penghasilan masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan PAD yang diperoleh pemerintah daerah setempat. Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat penghasilan masyarakat maka semakin meningkat pula tingkat kesejahteranya. Sehingga dapat dikatakan Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap PAD.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian M. Zahari MS (2017) dan Desmawati dkk (2015) yang menyatakan PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial. Akan tetapi bertolak belakang dengan penelitian Kartika dan Drajad (2020).

Hasil koefisien jalur diketahui bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negative. Artinya peningkatan pengeluaran pemerintah tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah tetapi menurunkan PAD. Sebaliknya penurunan Pengeluaran Pemerintah akan menyebabkan peningkatan PAD. Dari persamaan regresi, pengeluaran pemerintah mempunyai koefisien negative sebesar -1,368. Jika pengeluaran pemerintah bertambah 1% maka PAD akan menurun sebesar 136,8%. Nilai koefisien determinasinya $(PYX^2)^2$ yaitu sebesar $(-1,368)^2 \times 100\% = 187,14\%$. Berdasarkan Priyatno (2017), nilai koefisien determinan 187,12% dikategorikan pengaruh yang sangat besar.

Nilai koefisien jalur bertanda negative menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah berpengaruh negative terhadap PAD, sehingga dapat dikatakan pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap PAD.

SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, a) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Pendapatan asli daerah. b) Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negative terhadap Pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(2).
- Aryani, P. R., & Hari, K. K. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(2), 84–97.
- Dewi, I. R., Handayani, S. R., & Nuzula, N. F. (2014). Pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 17(1).
- Hidayat, A. S., & Nalle, F. W. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 71–86.
- Jannah, H. E. L. E. N., Suyadi, I., & Utami, H. N. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1).
- Kurniawan, A. I., Militina, T., & Suharto, R. B. (2017). Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. *Inovasi*, 13(2), 68–77.
- Mangkuwinata, S. M. I. (2014). Analisis Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Kebangsaan*, 3(6), 104012.
- Novriansyah, M. A. (2018). Labor And Government Expenditure On Economic Growth (Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi). *Gorontalo Development Review*, 1(2), 23–33.
- Oktafia, A. M., Soelistyo, A., & Arifin, Z. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 53–62.
- Pasaribu, H., & Ruserlistyani, R. (2012). *Peran Informasi Manajemen Biaya dan Faktor Pendukung Terhadap Kinerja Manajerial pada BUMN*.
- Prakarsa, F. D. (2014). *Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi kasus di Kabupaten Kota Jawa Timur tahun 2008-2012)*. Universitas Brawijaya.
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas Pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada badan keuangan daerah kabupaten tanah datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(1), 99–111.
- Rina, R. M. (2021). Pertumbuhan Ekonomi: Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan, Dan Belanja Daerah Dengan Konsumsi Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten Aceh Tenggara.

Rina Malahayati, Deni Trianda Pitri, Julianti

The Influence of Economic Growth and Government Expenditure on Regional Original Income in the Regional Government of Southeast Aceh Regency in 2017-2021

Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(3), 532–542.

Rosita, T., & Yuniati, T. (2016). Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dengan komitmen organisasional sebagai variabel intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 5(1).

Swastiwi, A. W., & Simbolon, G. (2021). Textile and Trade in Alam Melayu. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 10416–10424.

Zahari, M. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 15(4), 170–181.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).